

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mandat Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, adalah melaksanakan tugas-tugas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian baik bagi aparatur maupun baginon aparatur pertanian melalui pendidikan dan pelatihan. Aparatur pertanian adalah profesibagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah di sektor pertanian dengan perjanjian kerja, danbekerja pada instansi pemerintah, sedangkan non aparatur pertanian (petani/pekebun/peternak) adalah perorangan warga negara Indonesia besertakeluarganya atau korporasiyang mengelola usaha dibidang pertanian.

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, diantaranya melalui diklat-diklat berbasis kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatan yang dipangku, berdasarkan Permentan Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011, yaitu, Diklat bagi aparatur dan non aparatur pertanian, diklat bagi aparatur meliputi diklat fungsional, diklat teknis pertanian, dan diklat kewirusahaan, sedangkan diklat bagi non aparatur meliputi Diklat kepemimpinan, kewirausahaan, serta diklat teknis komoditas pertanian.

Dalam menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2016, BBPP Batangkaluku telah menumbuh kembangkan 102 (seratus dua) unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 6 (enam) Provinsi se-Sulawesi (Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Sulut, dan Gorontalo). Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat metransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya,

sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Diklat teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.

Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan diklatnya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa diklat), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda diklat, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikinya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melingkage dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pegelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dalam SAKIP, dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau terget kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja

strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIN.

Dalam rangka perencanaan kinerja pembangunan pertanian TA.2016, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2015.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

RKT Kementerian Pertanian Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian. Sedangkan tujuan yang dicapai adalah :

- a. Menyusun RKT Kementerian Pertanian Tahun 2017
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BBPP Batangkaluku
- c. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Penetapan Kinerja (PK) BBPP Batangkaluku Tahun 2016

#### **C. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPP Batangkaluku tahun 2016 adalah :

- a. Tersusunnya RKT BBPP Batangkaluku Tahun 2017 secara baik dan terukur
- b. Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan PK BBPP Batangkaluku Tahun 2017
- c. Meningkatnya efisiensi, efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BBPP Batangkaluku

#### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT BBPP Batangkaluku Tahun 2017 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tAHUN 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- d. Surat Keputusan LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi

Visi merupakan sebuah gambaran tentang masa depan dimana sebuah organisasi akan berada. Visi juga menjelaskan apa yang akan terjadi atau dicapai oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Visi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan Perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian baik nasional maupun internasional .

Dengan mengacu kepada tujuan pengembangan sumberdaya manusia pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian serta mencermati dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian , maka Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku merumuskan **Visi** sebagai berikut :

***“Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dan berdaya saing untuk menghasilkan SDM pertanian yang kreatif, inovatif dan professional.”***

#### B. Misi

Untuk mewujudkan visi, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2019. Misi Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku adalah :

1. Meningkatkan kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian diklat pertanian
2. Mengembangkan jejaring kerjasama, dan sistem informasi diklat pertanian
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian
5. Mengembangkan model teknik diklat, diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian, swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan
7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana teknis, administrasi dan manajemen BBPP

#### C. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara terperinci, jelas, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur secara kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kegiatan pada masa mendatang. Untuk itu, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mengefektifkan rencana program, pemantauan, evaluasi dan pengendalian diklat pertanian
2. Memantapkan keberlanjutan kerjasama, jejaring kerja, dan sistem informasi diklat pertanian.
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan dan mekanisasi pertanian.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dan profesi sekaligus pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian
5. Mengembangkan teknik dan metode pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan
7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana teknis, administrasi dan manajemen BBPP

#### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan indikator kinerja suatu lembaga dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Batangkaluku pada tahun 2015 - 2019 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari :

##### **1. Meningkatkan kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian diklat pertanian**

- a) Tersusunnya 1 dokumen rencana strategis (RENSTRA)
- b) Tersusunnya 25 dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian
- c) Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pengendalian Selama 5 tahun
- d) Tersusunnya 20 dokumen monitoring dan evaluasi pertanian
- e) Tersusunnya 10 (sepuluh) Standar Kompetensi Kerja Pertanian bagi aparatur maupun non aparatur pertanian

##### **2. Pengembangan jejaring kerjasama dan system informasi diklat**

- a) Meningkatkan promosi, publikasi dan sosialisasi kelembagaan pelatihan, kerjasama diklat, permagangan, operasional dan jasa pelayanan melalui berbagai media informasi di 6 provinsi
- b) Menyempurnakan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Diklat (termasuk standar pembiayaan diklat kerjasama)
- c) Menyusun panduan pembelajaran pertanian bagi generasi muda pertanian dan permagangan di BBPP Batangkaluku.

##### **3. Optimalnya kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan dan mekanisasi pertanian**

- a) Meningkatkan kompetensi 232 orang widyaiswara sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian
- b) Meningkatkan kompetensi 124 orang tenaga kediklatan dan fungsional khusus lainnya secara proporsional
- c) Meningkatkan kompetensi 10.920 aparatur melalui diklat (diklat teknis, diklat fungsional) untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta reformasi birokrasi yang responsive gender

- d) Meningkatkan kompetensi 7.890 non aparatur melalui diklat teknis, diklat kepemimpinan dan manajemen, serta diklat kewirausahaan untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta responsive gender
- e) Tersusunnya 10 dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dihasilkan
- f) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa 614 unit peralatan dan mesin
- g) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa gedung dan bangunan
- h) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa 5 unit kendaraan operasional (bus)

**4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian**

- a) Menyelenggarakan Diklat Pertanian Berbasis Kompetensi sebanyak 700 orang
- b) Melaksanakan Uji Kompetensi untuk sertifikasi kompetensi bidang pertanian bagi non aparatur sebanyak 700 orang
- c) Pengelolaan Tempat Uji Kompetensi profesi (TUK)
- d) Pengelolaan Lembaga Diklat Profesi (LDP)

**5. Mengembangkan model teknik diklat, diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian**

- a) Mengembangkan sistem metodologi pelatihan pertanian
- b) Uji penerapan system/metodologi pelatihan pertanian
- c) Sosialisasi/penyebaran system/metodologi pelatihan pertanian
- d) Mengembangkan pola pembelajaran baik dikelas (teori) maupun dilapangan (praktek)

**6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian, swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan**

- a) Pengelolaan sistem manajemen integrasi (SMI) ISO 9001-20015, SNI dan ISO 14001 - 20015
- b) Melaksanakan audit (internal dan eksternal) dan pengembangan SOP sistem manajemen integrasi (SMI) ISO 9001-20015, SNI, dan ISO 14001 - 20015
- c) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan evaluasi kinerja organisasi 20 kali
- d) Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian perdesaan swadaya (P4S) sebanyak 131 unit



- e) Terfasilitasinya dan melaksanakan re-klasifikasi 131 unit P4S di 6 (enam) Provinsi Se Sulawesi
- f) Terlaksananya pembinaan 6 unit FK-P4S di 6 (enam) Provinsi Se Sulawesi
- g) Tersusunnya 5 dokumen ketenagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan

**7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis**

- a) Mengembangkan unit usaha inkubator usaha tani/manajemen
- b) Terlayaninya kegiatan konsultasi agribisnis terhadap mitra/tenant dan pemangku kepentingan lainnya

### BAB III

#### PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

##### A. Perencanaan Program dan Kegiatan 2017

Program utama pembangunan pertanian merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kerja (PK)

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah : (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-1 dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja dilingkupnya. Program menghasilkan *outcome* . Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

BBPP Batangkaluku pada tahun 2017 melaksanakan 1 program yaitu Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian. Ukuran keberhasilan Eselon - II dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Adapun rancangan program dan kegiatan tahun 2017 secara rinci disajikan pada tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1. Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2017

No	Program/Kegiatan/Output
1	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b> Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1	Sertifikasi Profesi Bagi SDM Pertanian
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian
3	Layanan Internal (overhead )
4	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
5	Layanan Perkantoran

## B. Cara Melaksanakan Kegiatan

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Output</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b>	
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
	1 Sertifikasi Profesi Bagi SDM Pertanian	90 Org
	2 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	790 Org
	3 Layanan Internal (overhead )	2 Layanan
	4 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4 Layanan
	5 Layanan Perkantoran	12 Bulan

Untuk mencapai terget kegiatan strategis BBPP Batangkaluku pada tahun 2017, melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
  - Melakukan koordinasi dengan puslatan terkait calon peserta
  - Menginventarisir alumni diklat sebagai calon peserta
  - Melakukan rapat persiapan
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian
  - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seksi program dan kerjasama terkait anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut
  - Melakukan koordinasi antara panitia dengan sub bagian perlengkapan dan instalasi khususnya dalam hal persiapan sarana praktek
  - Membuat jadwal palang pelaksanaan kegiatan diklat
  - Pendataan dan pemanggilan calon peserta diupayakan untuk dilaksanakan lebih awal dan khusus untuk diklat yang memiliki calon peserta terbatas dengan wilayah tertentu
  - Persiapan dan perencanaan diklat yang menyangkut materi dan pengajaran dilaksanakan lebih awal
  - Rapat persiapan diklat diupayakan dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan diklat
  - Koordinasi antar panitia, penyelenggara dan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan diklat lebih ditingkatkan
- c. Layanan Internal (overhead )

- I. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PNBP)
  - Melakukan pengawasan terhadap penjualan hasil lahan secara berkala
  - Melakukan penyetoran penjualan hasil lahan ke bendahara penerimaan secara berkala
  - Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa (PNBP)
  - Pejabat pengadaan melakukan penyusunan paket pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa sesuai SOP yang berlaku
  
- II. Untuk Operasional dan Pemeliharaan Mesin –Mesin Pertanian
  - Menginventarisasi kebutuhan suku cadang/spare part mesin mesin pertanian (traktor besar, mini, hand traktor dan mesin pemotong (rumput)
  - Melakukan pengecekan secara berkala jumlah suku cadang alsintan
  - Melakukan perbaikan alsintan yang rusak secara berkala
  
- d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
  1. Pengembangan Kerjasama
    - I. Kegiatan Kerjasama Diklat
      - Melakukan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan BBPP-BK sebagai institusi dalam pengembangan SDM
      - Menyusun beberapa tawaran proposal kegiatan yang dapat dikerjasamakan
      - Khusus untuk pelatihan fungsional telah dilakukan upaya bersama-sama dengan Dinas Pertanian Se-Sulawesi untuk pelaksanaannya, baik melalui swadaya murni dari calon peserta maupun melalui bantuan pembiayaan dari APBD masing-masing
  
    - II. Kegiatan Kerjasama UPSUS, Pendampingan/Pengawasan UPSUS, Pengawasan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (Gppt) dan Pengembangan Kegiatan SIWAB
      - Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait kegiatan tersebut
      - Melaksanakan rapat persiapan
      - Menunjuk ketua tim untuk setiap provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut
      - Memantau perkembangan kegiatan tersebut dengan membuat laporan setiap bulannya

### **C. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Puslatan dengan tujuan untuk : (i) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (ii) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (iii) menyusun dokumen penetapan kinerja; (iv) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (v) melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku tahun 2015 - 2019 sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2015 - 2019 yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya
- b. Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Batangkaluku Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LAKIN)

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator - indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada tahun 2017 BBPP Batangkaluku melaksanakan 1 ( satu ) program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian serta 5 (lima) output guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan pembangunan pertanian. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

